

**Wapres : Dunia Soroti Intoleransi dan Kekerasan di Indonesia**  
**May 24, 2012**  
**By Era Baru News**

Jakarta – Wakil Presiden RI Boediono mengatakan dunia internasional saat ini menyoroti tentang meningkatnya intoleransi dan kekerasan terhadap kaum minoritas di Indonesia.

Selain intoleransi dan kekerasan, Ketidakadilan hukum yang menimpa rakyat juga menjadi perhatian masyarakat dunia.

“Belakangan ini banyak kasus-kasus kekerasan yang menjadi sorotan, termasuk oleh dunia internasional, terutama terkait meningkatnya intoleransi dan kekerasan terhadap minoritas yang berbeda faham dan kepercayaan. Juga kasus-kasus ketidakadilan hukum yang dialami rakyat kecil,” kata Boediono saat meresmikan pembukaan Rapat Kerja Kementerian Hukum dan HAM 2012 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (24/5/2012).

Wapres mengingatkan kembali tentang arahan Presiden saat pelantikan Menteri dan Wakil Menteri oktober 2011 lalu. Pada saat itu, jajaran Kementerian Hukum dan HAM diminta untuk memprioritaskan pengakkan hukum yang berkeadilan, menjamin penghormatan HAM termasuk menyelesaikan persoalan masa lalu.

Menurut Wapres, arahan Presiden juga meminta jajaran Kemenkumham untuk meningkatkan ikhtiar pemberantasan korupsi dan melakukan percepatan dalam sisa waktu yang tersedia hingga Oktober 2014.

Dalam rangka memprioritaskan penegakan hukum bagi rakyat secara keseluruhan, lembaga-lembaga penegak hukum diminta untuk memperhatikan program dan rencana kerja yang berkaitan dengan keadilan masyarakat kecil.

“Berkenaan dengan prioritas penegakan hukum yang berkeadilan, maka penting untuk memperhatikan program dan rencana kerja yang dibuat,” kata Wapres.

“Dalam kaitan ini, saya sangat menyarankan agar Forum yang menyangkut Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian (Mahkumjakpol) yang ada makin diefektifkan. Akses terhadap keadilan (*access to justice*) kepada masyarakat kecil harus betul-betul dijamin,” paparnya.

Oleh karena itu, Wapres mengingatkan setelah disahkan UU Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM diminta menjadi penggerak utama untuk membela dan memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin.

“UU Bantuan Hukum yang baru saja disahkan dan menjadi tanggung jawab Kementerian ini, harus mampu menjadi garda terdepan dalam menjamin bantuan hukum bagi kelompok miskin. Namun demikian, tentu prinsip dasar melakukan koordinasi tanpa intervensi tetap harus dijunjung tinggi,” ujar Wapres. (setwapres/asr)